

JURNAL

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PONOROGO
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN No. 15 TAHUN 2010
(Studi di Kantor BAPPEDA Kab. Ponorogo)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelara Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

GESANG DWI SETIYOKO

NIM 0910113214



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN
JURNAL**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PONOROGO
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN No. 15 TAHUN 2010
(Studi di Kantor BAPPEDA Kab. Ponorogo)**

**Oleh:
GESANG DWI SETIYOKO
NIM 0910113214**

Disetujui pada tanggal : Juli 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Agus Yulianto, S.H.,M.H
NIP. 19590717 198601 1 001**

**Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002**

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

**Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002**

ABSTRAKSI

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pelaksanaan program Penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan keuangan daerah bagi program tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada di lapangan. Lokasi penelitian di BAPPEDA Kabupaten Ponorogo. Jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diambil menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan diskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa pelaksanaan program penanggulangannya kemiskinan di Kabupaten Ponorogo antara lain bertujuan untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 25,04% ditahun 2011 dengan jumlah rumah tangga miskin sebesar 89.667. Sedangkan yang menjadi arah penanggulangan kemiskinan adalah untuk meningkatkan produktifitas dan meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan meliputi: perluasan kesempatan, pemberdaya masyarakat peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia serta perlindungan sosial, bahwa pengelolaan keuangan daerah untuk penanggulangannya kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara penentuan prioritas program mengingat alokasi anggaran untuk program ini sebagian besar atau sekitar 90% dari total anggaran masih berasal dari APBD Kabupaten Ponorogo sendiri, sedangkan bantuan dari APBD provinsi Jawa Timur maupun dari APBN pemerintah pusat masih sangat terbatas.

Berdasarkan dari uraian diatas penulis memberikan saran yakni mengingat pentingnya program penanggulangan kemiskinan, terutama di Kabupaten Ponorogo, maka adanya alokasi anggaran untuk program ini harus terus ditingkatkan terutama dukungan anggaran baik dari APBD Provinsi maupun APBN Pemerintah Pusat sehingga program penanggulangan kemiskinan bisa sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan keuangan daerah

ABSTRACT

In this research writer works through about Tacling program performing poverty and region finance management to program that.

This research utilize Sosiologis's Judicial Formality approximate methods, which is a problem approaching with mengkaji prevailing regulation at bearing with aught rule performing at the site. Observational location at BAPPEDA Ponorogo's Regency. Data type that at uses deep observational it is primary data and secondary data that taking to utilize interview tech and studi is bibliography. analisis's tech data utilizes diskriptip kualitatif.

Base observational result and study already being described on former chapter chapter therefore get as follows been concluded: That its tacling program performing poverty at Regency Ponorogo for example intent to hasten surrounding indigent population decrease 25,04% at year 2011 by total indigent families as big as 89.667. Meanwhile one becomes poverty tacling aim be subject to be increase productivity and softens indigent society expenditure charges. Poverties tacling programs cover: perluarsan is chance, pemberdaya is capacity step-up society and man resource and social protection, that regions financial management for tacling poverty at Regency Ponorogo did by priority determination programs to remember budget allocation to program it a large part or around 90% of total budget stills berasal dari APBD Ponorogo's Regencies own, meanwhile help from APBD East Java province and also from APBN federal is still really circumscribed.

Base from description upon writer gives tips namely remember the importance for poverty tacling program, particularly at Ponorogo's Regency, therefore marks sense budget allocation to program it has continually improved especially good budget support from APBD Province and also APBN IS Federal so poverties tacling program can in one's line, target and target already being established.

Key word: Tacling beggary and region finance management

PENDAHULUAN

Kemiskinan yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmakmuran untuk menyampaikan aspirasi, dapat mengakibatkan antara lain : (i) secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat, (ii) rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat, (iii) rendahnya partisipasi aktif masyarakat, (iv) menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (v) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (vi) kemungkinan pada merosotnya mutu generasi (lost generations).

Program penanggulangan kemiskinan pada masa lalu memperlihatkan beberapa kelemahan antara lain : (i) masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro dari pada pemerataan, (ii) lebih sentralisasi kebijakan dari pada desentralisasi kebijakan, (iii) lebih memposisikan masyarakat sebagai obyek dari pada subyek, (iv) cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan yang masih berorientasi pada keratif dari pada trasfotmatif dan produktifitas, (v) sasumsi permasalahan dan solisi kemiskinan sering dipandang sama (uniformitas) dari pada pluralistik.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah pasal 21 ayat (3) peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 menyatakan bahwa dimana pendanaan yang di perlukan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat Kab/Kota di kembangkan pada Anggaran Pendapatan dengan belanja daerah Kab/Kota

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, perlu adanya suatu program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Ponorogo, yang sejak mulai penyusunan sampai pelaksanaannya melibatkan seluruh komponen masyarakat. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo berjumlah 76.294 Rumah Tangga Miskin dari jumlah Rumah Tangga yang tercatat. Dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan, maka pada tahun 2011 Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Ponorogo digolongkan menjadi tiga bagian yaitu Hampir Miskin berjumlah 19,747 , Miskin berjumlah 23,038 , Sangat Miskin 18,461¹ atau Dari data tersebut terlihat bahwa penurunan jumlah Rumah Tangga Miskin maupun jumlah anggota keluarga yang masuk kategori miskin cukup signifikan. Hal yang terpenting dari data tersebut adalah bahwa jumlah orang dalam hal ini kepala keluarga dan anggota

¹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015

keluarganya merupakan fakta yang harus dihadapi dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Keb. Ponorogo.

Tujuan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Dijadikan sebagai strategi daerah yang menyeluruh, terpadu antara sector dan stakeholders, terencana dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan bagi semua pelaku, baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan
3. Sebagai sarana untuk membangun consensus dan mengintegrasikan upaya penanggulangan kemiskinan di lingkup daerah dengan pusat.

Dan diharapkan setelah selesainya program dimaksud dapat menumbuhkan rasa memiliki serta mendorong para pelaku pembangunan baik pemda, swasta maupun masyarakat untuk melibatkan diri dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dari sebagai segi yang telah dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kab. Ponorogo,
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan pemerintah Kab. Ponorogo untuk mendanai Program Penanggulangan Kemiskinan tersebut.

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlaku hukum positif di masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologi digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapan dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini supaya mendapatkan data yang akurat yaitu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini, terbagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari. Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari BAPPEDA Kabupaten Ponorogo.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain secara tidak langsung oleh penulis dari subyek penelitian. Data sekunder yang diperoleh dari referensi buku-buku kepustakaan atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terbagi dalam dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber langsung atau informasi yang mengetahui dan yang berkompeten. Data primer ini dapat diperoleh melalui serangkaian kegiatan wawancara. Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik dan benar mengenai masalah yang sedang diteliti. Menurut H. B. Sutopo, “dalam penelitian kualitatif, posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya”. Dalam hal ini, data atau informasi diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Penelitian informasi dalam penelitian ini dengan *purposive sampling* dimana peneliti akan memilih informan yang dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi dan diharapkan mengetahui

secara mendetail. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Ponorogo.

- b. Data sekunder adalah data yang digali dengan teknik studi kepustakaan, dimana akan mempelajari data dari kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum yang berupa buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berkaitan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat. Menurut H. B. Sutopo menjelaskan, “Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu”. Dalam hal ini yang termasuk data sekunder antara lain:
 - 1) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
 - 2) Data-data dan informasi lain yang menunjang penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam, artinya wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open-ended*, dan *mengarah pada kedalaman informasi yang diperoleh*. Wawancara ini sifatnya melebar, cara memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka dan berkelanjutan untuk mendapatkan informasi yang tepat. Wawancara dilakukan pada waktu dua konteks yang dianggap tepat guna mendapat data yang dirinci dan melebar, serta dapat dilakukan secara berulang kali sesuai dengan keperluan peneliti berkaitan dengan kejelasan masalah yang sedang ditelitinya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dengan mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang ada, baik berupa dokumen atau arsip. Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang bersangkutan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Dokumentasi ini diperoleh dari dokumen-dokumen administratif, keputusan dan ketetapan resmi.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka populasi dalam skripsi ini meliputi pejabat pada kantor BAPPEDA Kabupaten Ponorogo.

2. Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dimana sampel diambil dengan asumsi bahwa sampel yang terpilih mengetahui dan dapat menjawab masalah yang dijadikan sebagai kajian dalam penelitian.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala BAPPEDA Kabupaten Ponorogo
- 2) Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ponorogo.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian dilapangan maka penulis menggunakan metode deikriptif analisis, yaitu mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sebagaimana adanya dan menyandarkan kepada logika dalam bentuk uraian kalimat. Dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dilapangan kemudian ditarik kesimpulan sesuai permasalahan yang dikaji, kemudian digambarkan secara rinci dan dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

1. Tujuan Dan Sasaran

- a. Tujuan Pananggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

- 1) Mempercepat penurunan kemiskinan absolut serta melindungi keluarga kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara akibat dampak negatif krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial.
 - 2) Menurut jumlah penduduk miskin sekitar 25,04% di tahun 2011 dengan jumlah Rumah Tangga Miskin sebesar 89.667 jiwa yang diupayakan melalui:
 - a) Peningkatan produktifitas masyarakat miskin yang mana masyarakat miskin memperoleh peluang, kemampuan pengelolaan dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya maupun politik.
 - b) Pengurangan pengeluaran masyarakat miskin dalam mengakses kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi.
- b. Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo
- 1) Berdasarkan arah penanggulangan kemiskinan untuk peningkatan produktifitas dan meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin maka secara umum sasaran penanggulangan kemiskinan berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut:
 - a) Kelompok usia belum produktif (umur < 15 tahun);
 - b) Kelompok usia produktif (umur 15-60 tahun);
 - c) Kelompok usia tidak produktif (umur > 60 tahun)
 - 2) Pengelompokan tersebut merupakan kerangka umum yang dapat menjelaskan bahwa orientasi kebijakan peningkatan produktifitas ditunjukkan pada masyarakat miskin pada kelompok usia produktif dan orientasi kebijakan untuk mengurangi beban pengeluaran ditunjukkan pada masyarakat miskin usia belum produktif dan tidak produktif
 - 3) Selanjutnya dalam perencanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih operasional maka penetapan kelompok sasarannya adalah masyarakat miskin yang nantinya dikembangkan berdasarkan tujuan, sasaran target program dan karakteristik wilayah dimana masyarakat miskin berada.
2. Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

Program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Ponorogo dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Kebijakan dan Program Perluasan Kesempatan

Kebijakan perluasan berkaitan dengan penciptaan iklim dan lingkungan yang kondusif dalam rangka penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- a) Peningkatan alokasi fiskal untuk penanggulan kemiskinan.
- b) Menciptakann sistem pajak dan subsidi yang adil.
- c) Merangsang investasi untuk daerah-daerah miskin.
- d) Peningkatan stabilitas moneter terutama yang berkaitan dengan pengendalian harga-harga kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu.
- e) Peningkatan kinerja pelayanan publik.
- f) Kebijakan peningkatan praktek pemerintahan yang baik dalam pengelolaan kebijakan penanggulan kemiskinan.
- g) Peningkatan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Program perluasan kesempatan di Kabupaten Ponorogo:

- 1) Program pengembangan industri
- 2) Program peningkatan pemanfaatan penguasaan teknologi
- 3) Program peningkatan keterkaitan industri
- 4) Program pengembangan agribisnis
- 5) Program pelatihan dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja
- 6) Program penguatan institusi pasar
- 7) Program penanaman modal daerah
- 8) Program pengembangan perluasan daerah
- 9) Program peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan
- 10) Program perluasan pengembangan kesempatan

b. Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan upaya penguatan masyarakat dan kelembagaannya untuk mampu mengakses dan terlibat dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan publik, antara lain:

- 1) Pendampingan manajemen dan informasi kepada lembaga ekonomi sosial masyarakat miskin
- 2) Pengembangan forum lintas pelaku dalam komunikasi dan konsultasi baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat, maupun antar lembaga masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan publik
- 3) Penguatan legalitas bagi penyusunan aturan masyarakat lokal dalam rangka otonomi daerah
- 4) Penguatan akses terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, perumahan, serta prasarana transportasi dan komunikasi
- 5) Peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan
- 6) Penguatan akses dan kemampuan finansial, kemampuan organisasi modern, dan internalisasi budaya industri dalam proses industrialisasi dan pengembangan bisnis
- 7) Pembangunan akses kepada pasar tenaga kerja yang adil, baik antara tenaga kerja formal, informal, maupun antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan
- 8) Pengembangan jaringan kerjasama antar organisasi masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam rangka peningkatan pemasaran produk, penguatan posisi politis, kedudukan sosial dan etika berdemokrasi.

Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ponorogo

- 1) Program pengembangan sumberdaya, sarana dan prasarana kelembagaan perkebunan
 - 2) Program perlindungan tenaga kerja
 - 3) Program pengembangan perdagangan daerah
 - 4) Program perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat
 - 5) Program usaha peningkatan sumberdaya manusia
 - 6) Program PNPM Mandiri
- c. Kebijakan dan Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia
- Kebijakan peningkatan kemampuan/kapasitas berkaitan dengan upaya peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan peningkatan

ketrampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi serta informasi pasar. Kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Peningkatan penyedia dan pelayanan kebutuhan dasar yang langsung pada masyarakat miskin, terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih dan prasarana serta sarana dasar lainnya.
- 2) Pemberian potongan harga atau subsidi dalam berbagai pelayanan sosial dasar secara adil dan merata.
- 3) Penyediaan bantuan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang menunjang kegiatan ekonomi produktif masyarakat miskin
- 4) Penyediaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan seretan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin serta usaha mikro dan kecil
- 5) Kebijakan perbankan untuk peningkatan akses kredit dengan bunga terjangkau bagi penduduk miskin, usaha mikro, usaha kecil dan menengah
- 6) Perbaikan akses dan regulasi yang mendukung kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah, terutama di pemerintahan daerah.
- 7) Memberikan kegiatan pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kewirausahaan bagi masyarakat miskin serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- 8) Memberikan akses kepada pinjaman/kredit dengan suku bunga rendah bagi masyarakat miskin dan UMKM
- 9) Memperbaiki akses dan peraturan yang berkaitan dengan UKM
- 10) Membantu rumah tangga dan kelompok masyarakat miskin untuk mengembangkan produk yang dihasilkan oleh dan jaringan pemasaran diantara UMKM.

Program peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia:

- 1) Program penciptaan iklim dan usaha kondusif
- 2) Program peningkatan akses kepada sumberdaya produktif
- 3) Program pengembangan kewirausahaan
- 4) Program pendidikan pra sekolah
- 5) Program pendidikan dasar
- 6) Program pemberdayaan keluarga
- 7) Program Keluarga Berencana (KB)

- 8) Program perbaikan gizi masyarakat.
 - 9) Program ketahanan pangan dan gizi
 - 10) Program penyedia perumahan dan pemukiman
 - 11) Program penyediaan pengelolaan air bersih
 - 12) Program pemberdayaan dan pengembangan UMKM
 - 13) Program pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi
- d. Kebijakan dan Program Perlindungan Sosial
- Kebijakan perlindungan sosial berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, utamanya kelompok yang paling miskin (fakir miskin, orang jombo, anak terlantar, cacat) dan kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial, yang diarahkan melalui kemampuan kelompok masyarakat dalam menyisihkan sebagian dari penghasilan melalui mekanisme tabungan kelompok (pooled funds).
- Kebijakan tersebut meliputi:
- 1) Pengembangan sistem perlindungan sosial yang adil dan berkelanjutan melalui skema-skema asuransi pendidikan, kesehatan, hari tua dan pengangguran
 - 2) Pertumbuhan dan perluasan perlindungan sosial yang berbasis masyarakat (menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka melalui mekanisme pemusatan dana “pooled funds mechanism”)
 - 3) Meningkatkan keamanan sosial bagi pengemis dan anak terlantar
 - 4) Mengentaskan masyarakat di daerah terpencil dan terbelakang dari kemiskinan
 - 5) Jaring Pengaman Sosial, terutama bagi kesehatan dan pendidikan, dan juga untuk menangani mereka yang terkena dampak bencana alam, krisis ekonomi serta konflik sosial
- Program perlindungan sosial di Kabupaten Ponorogo:
- 1) Program upaya kesehatan
 - 2) Program pengembangan potensi kesejahteraan sosial
 - 3) Program peningkatan kualitas pelayanan sosial
 - 4) Program pengembangan kebijakan penanganan masalah-masalah sosial

- 5) Program pemberdayaan perealam gender
 6) Program peningkatan partisipasi pemuda
3. Indikator keberhasilan Program Penanggulannya Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Ponorogo maka indikator keberhasilan dari Program Penanggulangan kemiskinan dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Program Perluasan Kesempatan

No.	Program Perluasan Kesempatan	Indikator Kebersihan	Target
1	2	3	4
1.	Program Pengembangan Industri	Meningkat nilai ekspor produk-produk industri	100%
2.	Program Peningkatan Pemanfaatan Penguasaan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kualitas dan daya saing produk dalam rangka menghadapi globalisasi ▪ Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna bagi industri kecil menengah 	100%
3.	Program Peningkatan Keterkaitan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya peran dan kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ▪ Meningkatnya keterkaitan antar industri rumah tangga, kecil, menengah dan besar 	100%
4.	Program Pengembangan Agribisnis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya ekspor produk-produk pertanian tanaman pangan ▪ Meningkatnya peranan kelembagaan petani dalam produktifitas pertanian tanaman pangan 	100%
5.	Program Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya relevansi, kualitas dan efisiensi pelatihan tenaga kerja ▪ Terciptanya standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, khususnya bagi TKI 	100%
6.	Program Penguatan Institusi Pasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya sistem dan jaringan informasi ekspor ▪ Perluasan struktur dan pasar tujuan ekspor ▪ Meningkatnya jumlah dan nilai penanaman modal 	100%

7.	Program Penanaman Modal Daerah	daerah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya prosedur investasi yang lebih efisien ▪ Terwujudnya perusahaan daerah yang kondisi keuangannya sehat 	100%
8.	Program Pengembangan Perusahaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya hubungan BUMD dengan usaha lain ▪ Meningkatkan kualitas SDM perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keahlian 	100%
9.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan informasi tentang hak dan perlindungan bagi perempuan ▪ Terciptanya perluasan lapangan kerja di berbagai bidang usaha bagi pencari kerja 	100%
10.	Program Perluasan Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkurangnya jumlah pengangguran baik di pedesaan maupun di kota 	100%

b. Program Pemberdayaan Masyarakat

No.	Program Pemberdayaan Masyarakat	Indikator Kebersihan	Target
1	2	3	4
1.	Program Pengembangan Sumber daya Sarana dan Prasana Kelembagaan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkembangan kemampuan petani dari kelompok menjadi bisnis usaha rakyat dalam kelembagaan koperasi ▪ Berkembangnya lahan perkebunan, intensitas tanam dan diversifikasi ▪ Meningkatnya perlindungan, pengawasan dan penegakan hukum perantara ketenagakerjaan 	100%
2.	Program Perlindungan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja dan syarat-syarat 	100%
3.	Program Pengembangan Pendayagunaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbitnya pengawasan perdagangan daerah ▪ Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan daerah 	100%
4.	Program Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya prosentase penduduk yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat ▪ Meningkatnya prosentase 	100%

5.	Program Usaha Peningkatan Sumber Daya Manusia	tempat-tempat umum, pengolahan makanan dan sekolah yang memenuhi syarat kesehatan Meningkatnya prosentase penduduk yang memiliki ketrampilan kerja	100%
6.	Program PNPM Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pendapatan penduduk miskin ▪ Menurunnya angka kemiskinan 	100%

c. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia

No.	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia	Indikator Kebersihan	Target
1	2	3	4
1.	Program Penciptaan Iklim dan Usaha Kondusif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya koperasi yang tangguh, profesional dan mandiri yang ditopang sumber daya manusia yang memadai ▪ Secara kuat dan konsisten oleh kegiatan usaha para anggotanya ▪ Meningkatnya kegiatan perekonomian rakyat yang tergabung dalam wadah koperasi 	100%
2.	Program Peningkatan Akses Kepala Sumber Daya Produktif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas ▪ Meningkatnya upaya kemitraan antara pengusaha kecil menengah dan usaha besar 	100%
3.	Program Pengembangan Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah pengusaha kecil menengah dan peranannya dalam perekonomian ▪ Meningkatnya jumlah investasi pengusaha kecil menengah 	100%
4.	Program Pendidikan Pra Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah 	100%
5.	Program Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pra sekolah ▪ Berkurangnya angka putus sekolah dan mengulang kelas 	100%
6.	Program Pemberdayaan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya pendidikan 	100%

7.	Program KB	<p>bagi anak sekolah yang putus sekolah dan kurang beruntung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpenuhi kebutuhan dasar bagi keluarga yang kurang mampu ▪ Meningkatnya kualitas keluarga dalam mengakses informasi, sumberdaya ekonomi dan menurunnya tindak kekerasan dalam keluarga 	100%
8.	Program Perpaibakan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pelayanan KB dari lembaga non pemerintah ▪ Meningkatnya partisipasi masyarakat, institusi sosial dalam pelayanan KB 	100%
9.	Program Ketahanan Pangan dan Gizi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan prosentase keluarga sadar gizi ▪ Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita ▪ Meningkatnya ketersediaan beras dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras ▪ Meningkatnya bahan pangan substitusi import 	100%
10.	Program Penyediaan Perumahan dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau ▪ Tersedianya prasarana dan sarana perumahan dan permukiman secara terpadu dan sesuai perencanaan tata ruang 	100%
	Program Penyedia Pengelolaan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tercapainya sasaran penduduk perkotaan dan pedesaan yang dapat menikmati air bersih 	100%
11.	Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyedia air bersih 	100%
12.	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air dan Irigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya gairah perekonomian di pedesaan dan kota 	100%
13.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya kemampuan pengelola koperasi ▪ Meningkatnya pemanfaatan dan prosuktifitas sumber-sumber air ▪ Meningkatnya efisiensi, 	

		efektifitas dan kemandirian operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigrasi	
--	--	--	--

d. Program Perlindungan Sosial

No.	Program Perlindungan Sosial	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Program Upaya Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya prosentase jumlah orang sakit yang berobat ke sarana kesehatan ▪ Meningkatnya prosentase penduduk yang telah ikut JPKM/Dana Sehat/Asuransi kesehatan ▪ Meningkatnya jumlah anak nakal, korban akibat penyalahgunaan narkoba dan tuna susila yang mendapat pelayanan sosial 	100%
2.	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya prosentase penduduk miskin terhadap total penduduk ▪ Tersusunnya standarisasi pelayanan sosial 	100%
3.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah tenaga sosial dan lembaga pelayanan sosial yang berkualitas <p>Mantapnya kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah sosial yang melibatkan peran pemerintahan</p>	100%
4.	Program Pengembangan Kebijakan Penanganan Masalah-masalah Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah dan peranan lembaga yang memperjuangkan hak-hak perempuan 	100%
5.	Program Pemberdayaan Perempuan dalam Gender	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya proporsi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan ▪ Meningkatnya ketertiban organisasi pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan 	100%
6.	Program Peningkatan Partisipasi Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah pelatihan bagi generasi muda dalam kewirausahaan 	100%

Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

Alokasi anggaran Kabupaten Ponorogo untuk program penanggulangan kemiskinan untuk Tahun 2011 bersumber dari APBD. Propinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Ponorogo serta swadaya masyarakat sebagai berikut:

SUMBER PEMBIAYAAN	TOTAL (Rp)	PERSEN (%)
1. APBN	0	0
2. APBD Propinsi	690.000.000	2,00
3. APBD Kab. Ponorogo	17.130.000.000	90,00
4. Swadaya	1.713.000.000	8,00
Gran Total	17.993.000.000,00	100

Sumber pembiayaan terbesar untuk program penanggulangan kemiskinan pada Tahun 2011 adalah dari APBD Kabupaten Ponorogo sendiri yakni sebesar 17.130.000.000 atau 90% dari total anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya, apabila dilihat dari anggaran belanja daerah bidang program penanggulangan kemiskinan dapat dijelaskan seperti tabel berikut:

PROGRAM	TOTAL	PERSEN
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	160.000	
Program Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja	352.950.000	
Program Pelayanan Administasi Perkantoran	269.343.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.496.500	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	25.000.000	
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	156.707.000	
Fasilitas Penyedia Prosedur, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	52.084.000	
Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian Perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	77.089.000	
Sosial berbagi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	327.534.000	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	6.000.000	
Program pembinaan anak terlantar	7.700.000	

Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	6.000.000	
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	7.500.000	
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	19.800.000	
Grand Total	12.000.000	

Berangkat dari adanya anggaran yang terbatas seperti di jelaskan di atas, maka BAPPEDA Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pengelolaan keuangan, telah melakukan upaya untuk memberikan prioritas pada program-program penanggulangan secara keseluruhan bisa tercapai. Tujuan dari program tersebut pada akhirnya adalah:

- a. Mewujudkan persepsi dan konsep yang sama untuk menanggulangi kemiskinan bagi seluruh stakeholder/institusi, yaitu institusi pemerintahan (pusat maupun daerah), DPR/DPRD, LSM, Dunia Usaha, Organisasi Profesi, Akademisi dan kelompok masyarakat lainnya (termasuk kelompok masyarakat miskin).
- b. Menciptakan mekanisme institusional yang efektif yang saling menguntungkan untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif dalam menanggulangi kemiskinan.
- c. Menciptakan iklim dan lingkungan yang mampu mendorong perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin untuk lebih berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya dan memperoleh pelayanan publik yang tidak diskriminatif.
- d. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemantapan kelembagaan sosial, ekonomi dan politik bagi kelompok masyarakat miskin.
- e. Meningkatkan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan melalui perbaikan kesehatan dan pendidikan, ketrampilan, usaha, permodalan, prasarana, teknologi, serta informasi pasar.
- f. Meningkatkan pendapatan kelompok miskin melalui peningkatan kesempatan kerja dan berusaha dengan meningkatkan permodalan, pelatihan, pendampingan maupun penjaminan.

- g. Mengurangi pengeluaran kelompok miskin melalui peningkatan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
- h. Membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang terkena bencana alam, dampak negatif dari krisis ekonomi dan konflik sosial.
- i. Mendorong terciptanya kerjasama antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya membantu kelompok masyarakat miskin.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan program penanggulangannya kemiskinan di Kabupaten Ponorogo antara lain bertujuan untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 25,04% ditahun 2011 dengan jumlah rumah tangga miskin sebesar 89.667. Sedangkan yang menjadi arah penanggulangan kemiskinan adalah untuk meningkatkan produktifitas dan meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan meliputi: perluasan kesempatan, pemberdaya masyarakat peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia serta perlindungan sosial
2. Bahwa pengelolaan keuangan daerah untuk penanggulangannya kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara penentuan prioritas program mengingat alokasi anggaran untuk program ini sebagian besar atau sekitar 90% dari total anggaran masih berasal dari APBD Kabupaten Ponorogo sendiri, sedangkan bantuan dari APBD provinsi Jawa Timur maupun dari APBN pemerintah pusat masih sangat terbatas

Saran – saran

Berdasarkan dari uraian diatas penulis memberikan saran yakni mengingat pentingnya program penanggulangan kemiskinan, terutama di Kabupaten Ponorogo, maka adanya alokasi anggaran untuk program ini harus terus ditingkatkan terutama dukungan anggaran baik dari APBD Provinsi maupun APBN Pemerintah Pusat sehingga program penanggulangan kemiskinan bisa sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

HAW. Widjaja, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: RajaGrafindo persada.

Deddy Supriyadi Bratakusuma dan Dadang Sholihin, 2001, *Otonomi penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nur Basuki Minarno, 2008, *Penyalahgunaan wewenang dalam pengelola keuangan Daerah*, Surabaya: Laksbang Mediatam.

Achmad Subeka, 2012, *Keuangan Daerah*, Malang: Alta Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Internet :

<http://www.bappenas.go.id/node/48/2308/sistem-perencanaan-keserasian-kebijakan-dan-dinamika-pelaksanaan-otonomi-daerah---oleh-mustopadidjaja-ar/>

Wikipedia, Otonom daerah (online), http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

Wikipedia, Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,

id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah